



EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

Andi Asti Handayani

Universitas Negeri Makassar

Tuti Supatminingsih

Universitas Negeri Makassar

Korespondensi penulis: andiastihandayani@unm.ac.id

Abstrak. *Makassar City, as one of the metropolitan cities in Eastern Indonesia, has a great responsibility to ensure financial management that supports sustainable development and optimal public services. This study evaluates the financial performance of Makassar City in 2021–2023 based on the Value for Money principle, namely economic aspects, efficiency, and effectiveness. The research method is quantitative descriptive and secondary data sources in the form of the Budget Realization Report (LRA) of Makassar City regional revenue and expenditure downloaded from the official website of the Makassar City Government. The economic ratio analysis shows that budget management was categorized as economical in 2021 and 2022, and fairly economical in 2023. The efficiency ratio was categorized as less efficient in 2021 and 2022, and not efficient in 2023. Meanwhile, the effectiveness ratio was highly effective in 2021 and fairly effective in both 2022 and 2023. These findings indicate that although Makassar City's budget management was relatively frugal in the first two years, efficiency and effectiveness declined in the third year.*

Keywords: *Financial Performance, Value for Money, APBD*

Abstrak. Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia Timur, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal. Penelitian ini mengevaluasi kinerja keuangan Kota Makassar tahun 2021–2023 berdasarkan prinsip Value for Money yaitu aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar yang diunduh melalui situs resmi Pemerintah Kota Makassar. Hasil analisis rasio ekonomis menunjukkan pada tahun 2021 dan 2022 dikategorikan ekonomis, sedangkan tahun 2023 masuk kategori cukup ekonomis. Rasio efisiensi pada tahun 2021 dan 2022 kategori kurang efisien, namun di tahun 2023 masuk kategori tidak efisien. Sementara itu, rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif di tahun 2021, kemudian cukup efektif di tahun 2022 dan 2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa meski pengelolaan APBD Kota Makassar relatif hemat pada dua tahun pertama, terjadi penurunan efisiensi dan efektivitas di tahun ketiga.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Value for Money, APBD

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang merata, dan program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di kawasan Indonesia Timur, memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal, sehingga diharapkan mampu menjadi teladan dalam penerapan otonomi daerah yang sukses.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam

membayai pelaksanaan pemerintahan serta program pembangunan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan APBD harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan APBD yang berkualitas memungkinkan alokasi anggaran yang tepat dan berdampak positif bagi sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski demikian, sejumlah tantangan seperti ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi pelaksanaan, serta kurangnya efisiensi, kerap menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga diperlukan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pengukuran kinerja pengelolaan APBD menjadi penting dalam rangka menilai sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Melihat kinerja dari sudut pandang nilai guna anggaran atau *value for money* adalah salah satu cara yang dapat digunakan. *Value for money* (VfM) adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan tiga aspek yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2019).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Verliana Diva et al. (2024) dengan judul “*Analisis Value for Money Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021-2023*” memberikan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok dari segi ekonomi menunjukkan stabilitas, meskipun pada satu tahun dikategorikan tidak ekonomis. Rasio efisiensi menunjukkan ketidakstabilan, tetapi pada tahun terakhir kembali efisien. Dari segi efektivitas, kinerja keuangan stabil, meskipun pada satu tahun tidak efektif. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Neti Oktavianty et al. (2024) dengan judul “*Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Konsep Value for Money*” periode 2019-2022. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat konsisten ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif. Penelitian lain oleh Joanico Francisco Ximenes Alexandre et al. (2023) dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-202*” menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya cukup stabil secara ekonomis, efisien setiap tahun, tetapi efektivitasnya tidak stabil, hanya efektif pada beberapa tahun dan tidak efektif pada tahun lainnya.

Perbedaan hasil penelitian tersebut dipengaruhi oleh perbedaan lokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode *Value for Money* Pada Pengelolaan APBD Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan APBD Kota Makassar telah mencerminkan prinsip-prinsip *value for money*

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kinerja diartikan sebagai hasil atau capaian yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan, baik yang telah dicapai maupun yang direncanakan, dengan tolok ukur yang mencakup aspek kuantitas dan kualitas penggunaan anggaran. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan tersebut, diperlukan sistem pengukuran kinerja. Dalam sektor publik, sistem ini berfungsi untuk membantu manajer publik dalam mengevaluasi indikator-indikator kinerja secara menyeluruh, mencakup dimensi keuangan maupun non-keuangan, sehingga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui mekanisme legislatif. APBD berperan penting sebagai pedoman utama dalam pengelolaan seluruh aktivitas keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan APBD ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

Kuangan Negara, khususnya pada Pasal 1 ayat 8, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Value for money adalah pengelolaan sektor publik yang didasarkan pada tiga hal utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Ekonomis diukur dengan membandingkan input sekunder dan input primer. Ekonomi adalah proses mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas tertentu dan harga terbaik. Penghematan terjadi ketika sumber daya digunakan lebih rendah dari anggaran, dan pemborosan terjadi ketika sumber daya digunakan lebih dari anggaran (Mardiasmo, 2018). Efisiensi berkaitan dengan konsep produktivitas dan diukur melalui perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Jika suatu kegiatan operasional menghasilkan produk atau hasil kerja dengan sumber daya yang minimal dan biaya yang minimal, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut efisien. Efisiensi memiliki kesamaan dengan ekonomi karena keduanya bertujuan untuk meminimalkan biaya (*cost reduction*) (Mardiasmo, 2018). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (*output*) dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Efektivitas mencerminkan sejauh mana dampak atau hasil (*outcome*) dari keluaran program berkontribusi pada pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap tujuan yang ditetapkan, semakin efektif proses kerja organisasi tersebut (Mardiasmo, 2018).

Peneliti merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai pembanding dan landasan pengembangan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian yang menjadi rujukan peneliti:

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Ringkasan Temuan Artikel
1	”Analisis <i>Value for Money</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021-2023”	Verliana Diva, Sonny Fransisco Siboro, Anila Ambarani, Adella Yudanti	2024	Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok 2021-2023 stabil secara ekonomis (rata-rata 85,53%) dan efektivitas (rata-rata 103,21%), tetapi tidak stabil dalam efisiensi (rata-rata 84,44%). Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dengan rasio ekonomis 30,69%, efisiensi 84,44%, dan efektivitas 113,84%. Perbaikan diperlukan untuk menjaga stabilitas efisiensi.
2	“Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai	Neti Oktaviany, Gita Desyana,	2024	Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun

EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

	Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Konsep <i>Value for Money</i> ”	Rudy Kurniawan		2019-2022, berdasarkan konsep <i>value for money</i> , konsisten ekonomis (rata-rata 92,99%), cukup efisien (rata-rata 89,87%), dan sangat efektif (rata-rata 101,54%). Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran, menunjukkan penghematan, dengan efektivitas pendapatan melebihi target.
3	"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2021”	Joanico Francisco Ximenes Alexandre, Muhammad Taufik, Hidayat	2023	Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya 2015-2021 cukup ekonomis (rata-rata 87,74%), efisien (rata-rata <100%), namun efektivitas tidak stabil (efektif pada 2015, 2020, 2021; tidak efektif pada 2016-2019). Perlu peningkatan efektivitas.

.Tabel 1. Penelitian Terdahulu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagai metode utama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengolah dan menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan kondisi yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan, tanpa melakukan manipulasi terhadap fakta sebagaimana dijelaskan oleh Hariatih (2022). Metode deskriptif kuantitatif ini dirancang untuk menyajikan informasi dalam bentuk angka secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga mampu menggambarkan karakteristik dan realitas objek penelitian dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sujarweni (2015), data sekunder mencakup berbagai sumber informasi seperti laporan keuangan, publikasi resmi pemerintah, artikel ilmiah, buku-buku teori, majalah, serta sumber terpercaya lainnya. Adapun data yang dianalisis oleh peneliti berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk periode tahun 2021 hingga 2023, yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar pada tahun-tahun tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengakses dokumen resmi melalui platform daring (online), termasuk di antaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Makassar

EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

untuk tahun anggaran 2021 hingga 2023. Seluruh dokumen tersebut diperoleh dari situs web resmi milik pemerintah daerah, guna memastikan keaslian serta validitas sumber informasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah rasio Value for Money yang mengevaluasi tiga komponen utama: aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga aspek tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar selama periode yang menjadi objek kajian. Selanjutnya, hasil penghitungan rasio tersebut dijelaskan secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tingkat pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Ringkasan LRA Kota Makassar Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Lebih/(Kurang)	%
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
Pendapatan	3.577.236.761.303,8 2	3.286.048.497.393,9 3	291.188.263.909,89	91.8 6
Pendapatan Asli Daerah	1.326.375.011.303,8 2	1.140.328.483.697,9 3	186.046.527.605,89	85.9 7
Pendapatan Transfer	2.046.855.278.000,0 0	1.979.478.474.976,0 0	67.376.803.024,00	96.7 1
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	204.006.472.000,00	166.241.538.720,00	37.746.933.280,00	81.4 9
Belanja	4.165.165.032.351,6 1	3.150.496.728.994,0 7	1.014.668.303.357,5 4	75.6 4
Belanja Operasi	3.246.539.826.405,4 9	2.665.273.234.471,5 0	581.086.591.933,99	82.1 0
Belanja Modal	668.274.936.260,00	322.972.030.025,57	345.302.906.234,43	48.3 3
Belanja Tak Terduga	250.530.269.686,12	162.251.464.497,00	88.278.805.189,12	64.7 6

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Ringkasan LRA Kota Makassar Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Lebih/(Kurang)	%
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
Pendapatan	3.986.429.637.856,0 0	3.587.333.930.242,5 0	399.095.707.613,5	89.9 9
Pendapatan Asli Daerah	1.715.032.322.000,0 0	1.410.813.774.025,2 3	304.218.547.974,77	82.2 6
Pendapatan Transfer	2.203.946.243.856,0 0	2.167.571.812.217,2 7	36.374.431.638,73	98.3 5
Lain-lain Pendapatan	67.451.072.000,00	8.948.344.000,00	58.504.728.000,00	13.2 7

EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

n Daerah Yang Sah				
Belanja	4.700.694.460.499,65	3.549.062.984.209,34	1.151.631.476.290,31	75.50
Belanja Operasi	3.672.834.811.762,15	3.081.067.816.510,34	654.766.995.251,81	83.89
Belanja Modal	958.065.538.839,65	450.295.828.749,00	507.769.710.090,65	47.00
Belanja Tak Terduga	69.794.109.897,85	17.699.338.950,00	52.094.770.947,85	25.36

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Ringkasan LRA Kota Makassar Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Lebih/(Kurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
Pendapatan	4.517.197.053.787,00	4.049.377.501.946,78	467.819.551.840,22	89.64
Pendapatan Asli Daerah	1.965.695.699.807,00	1.568.267.701.812,65	397.427.997.994,35	
Pendapatan Transfer	2.508.050.764.460,00	2.448.087.150.383,63	59.963.614076,37	97.61
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	43.450.589.520,00	33.022.649.750,50	10.427.939.769,5	76.00
Belanja	5.262.232.822.463,81	4.507.727.571.970,40	754.505.250.466,41	85.66
Belanja Operasi	3.769.476.891.718,00	3.374.420.647.297,40	395.056.244.450,6	89.52
Belanja Modal	1.459.618.749.399,00	1.130.808.481.698,00	328.810.267.701,00	77,47
Belanja Tak Terduga	33.137.181.346,81	2.498.442.975,00	30.640.738.371,81	7.54

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Rasio ekonomis diperoleh dengan membandingkan jumlah realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah direncanakan sebelumnya (Mahmudi, 2016). Analisis terhadap rasio ini berperan penting dalam menilai tingkat efisiensi penggunaan dana, sehingga pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengeluaran telah dilakukan secara hemat, efektif, dan sesuai dengan kerangka perencanaan keuangan yang telah ditetapkan.

Rumus yang digunakan ialah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Nilai rasio ekonomis ini kemudian dianalisis untuk menentukan kategorinya.

Kriteria Tingkat Ekonomis Penerimaan

Kategori	Predikat
>100%	Tidak ekonomis
91%-100%	Kurang ekonomis
81%-90%	Cukup ekonomis
61%-80%	Ekonomis

EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

<60%	Sangat ekonomis
------	-----------------

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327. Tahun 1996

Perhitungan Rasio Ekonomis Belanja Kota Makassar

No	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Ekonomis	Keterangan
1	2021	3.150.496.728.994,07	4.165.165.032.351,61	75,63%	Ekonomis
2	2022	3.549.062.984.209,34	4.700.694.460.499,65	75,50%	Ekonomis
3	2023	4.507.727.571.970,40	5.262.232.822.463,81	85,66%	Cukup Ekonomis

Sumber: Data diolah (2025)

Rasio ekonomis belanja Kota Makassar memperlihatkan tren yang bervariasi pada periode 2021-2023. Pada tahun 2021, rasio ekonomis sebesar 75,63% dengan kategori "Ekonomis," yang berarti pengelolaan anggaran relatif hemat dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.150.496.728.994,07 dari total anggaran belanja Rp4.165.165.032.351,61. Kemudian, pada tahun 2022, rasio ekonomis sedikit menurun menjadi 75,50%, tetapi masih berada dalam kategori "Ekonomis," dengan anggaran belanja meningkat menjadi Rp4.700.694.460.499,65 dan realisasi anggaran sebesar Rp3.549.062.984.209,34. Pada tahun 2023, rasio ekonomis meningkat signifikan menjadi 85,66% dengan kategori "Cukup Ekonomis," di mana realisasi anggaran mencapai Rp4.507.727.571.970,40 dari total anggaran belanja Rp5.262.232.822.463,81. Semakin kecil rasio ekonomis, semakin hemat pengelolaan anggaran, karena menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan. Tren peningkatan rasio ekonomis dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Kota Makassar cenderung kurang hemat pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih ketat, seperti pengendalian belanja yang lebih efektif atau alokasi anggaran yang lebih realistis, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Rasio efisiensi berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan berbagai layanan atau output publik secara optimal. Tingkat efisiensi dinilai dengan membandingkan antara pengeluaran daerah yang sebenarnya dengan pendapatan daerah yang terealisasi. Rasio ini penting untuk menilai apakah penggunaan anggaran sudah dilakukan secara hemat dan sesuai dengan prinsip value for money (Mahmudi, 2016).

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai rasio efisiensi ini kemudian dianalisis untuk menentukan kategorinya.

Kriteria Rasio Efisiensi

Kategori	Predikat
>100%	Tidak efisien
91%-100%	Kurang efisien
81%-90%	Cukup efisien
61%-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327. Tahun 1996

Perhitungan Efisiensi Belanja Kota Makassar

No	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
1	2021	3.150.496.728.994,07	3.286.048.497.393,93	95,87%	Kurang Efisien
2	2022	3.549.062.984.209,34	3.587.333.930.242,50	98,93%	Kurang Efisien
3	2023	4.507.727.571.970,40	4.049.377.501.946,78	111,31%	Tidak Efisien

EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

Sumber: Data diolah (2025)

Rasio efisiensi belanja Kota Makassar memperlihatkan kecenderungan yang kurang positif sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, rasio efisiensi sebesar 95,87% dengan kategori "Kurang Efisien," di mana realisasi anggaran belanja sebesar Rp3.150.496.728.994,07 dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp3.286.048.497.393,93. Pada tahun 2022, rasio efisiensi meningkat menjadi 98,93%, masih dalam kategori "Kurang Efisien," dengan realisasi anggaran belanja Rp3.549.062.994.209,34 dan realisasi anggaran pendapatan Rp3.587.333.930.242,50. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana rasio efisiensi mencapai 111,31% dengan kategori "Tidak Efisien," menunjukkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp4.507.727.571.970,40 melebihi realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp4.049.377.501.946,78. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin tidak efisien pengelolaan anggaran, karena realisasi anggaran belanja lebih besar dibandingkan realisasi anggaran pendapatan. Tren peningkatan rasio efisiensi dari tahun ke tahun ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran di Kota Makassar semakin tidak efisien, terutama pada tahun 2023, di mana realisasi belanja melampaui pendapatan yang diterima. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik karena belanja yang berlebihan maupun pendapatan yang tidak mencapai target optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menyeimbangkan realisasi belanja dan pendapatan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD di masa mendatang.

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Rasio ini mengkaji perbandingan antara pendapatan yang berhasil direalisasikan dengan anggaran pendapatan yang telah direncanakan, yang mencerminkan seberapa baik tujuan yang telah diatur sebelumnya dicapai. Evaluasi terhadap rasio ini membantu mengidentifikasi apakah target keuangan daerah telah tercapai secara optimal (Mahmudi, 2016). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai rasio efektivitas ini kemudian dianalisis untuk menentukan kategorinya.

Kriteria Rasio Efektivitas

Kategori	Predikat
>100%	Sangat efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup efektif
61%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327. Tahun 1996

Perhitungan Efektivitas Pendapatan Kota Makassar

No	Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
1	2021	3.286.048.497.393,93	3.577.236.761.303,82	91,85%	Efektif
2	2022	3.587.333.930.242,50	3.986.429.637.856,00	89,98%	Cukup Efektif
3	2023	4.049.377.501.946,78	4.517.197.053.787,00	89,69%	Cukup Efektif

Rasio efektivitas pendapatan Kota Makassar menunjukkan tren penurunan selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, nilai efektivitas sebesar 91,85% dengan kategori "Sangat Efektif," di mana realisasi pendapatan sebesar Rp3.260.045.497.393,93 dibandingkan dengan anggaran pendapatan sebesar Rp3.577.236.761.303,82. Pada tahun 2022, rasio efektivitas menurun menjadi 89,98%, masuk kategori "Cukup Efektif," dengan realisasi pendapatan Rp3.587.333.930.242,50 dari anggaran Rp3.986.429.637.856,00. Penurunan berlanjut pada tahun 2023, di mana rasio efektivitas mencapai 89,69%, masih dalam kategori "Cukup Efektif," dengan

EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR

realisasi pendapatan Rp4.049.377.501.946,78 dari anggaran Rp4.517.197.053.787,00. Semakin rendah rasio efektivitas di bawah 100%, semakin menunjukkan ketidakmampuan mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Tren penurunan rasio efektivitas ini memperlihatkan bahwa pengelolaan pendapatan di Kota Makassar semakin menantang, kemungkinan karena target anggaran yang terlalu tinggi atau faktor eksternal yang memengaruhi realisasi pendapatan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih efisien, seperti penetapan target anggaran yang lebih realistis atau peningkatan strategi dalam pengumpulan pendapatan, guna memaksimalkan kinerja keuangan daerah di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Makassar selama periode 2021–2023, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Rasio ekonomis menunjukkan pengelolaan anggaran Kota Makassar cukup hemat pada 2021–2022, namun pada 2023 terjadi penurunan efisiensi belanja, mengindikasikan perlunya pengendalian anggaran yang lebih baik. (b) Rasio efisiensi mengalami tren penurunan kualitas, dengan realisasi belanja yang pada 2023 melebihi realisasi pendapatan, menandakan ketidakseimbangan keuangan dan perlunya strategi pengelolaan belanja yang lebih ketat. (c) Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, mengindikasikan tantangan dalam pencapaian target pendapatan dan perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar selama periode 2021–2023 masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek efisiensi dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandre, J. F. X., Taufik, M., & Hidayat. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan value for money pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015–2021. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi (JREA)*, 1(4), 201–218. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.982>
- Hariatih. (2022). Analisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2019–2021. *Jurnal Manuver*, 2(1), 45–56. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/4064>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Kementerian Dalam Negeri.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Buku akuntansi sektor publik* (hlm. 1–18; 23 cm). Yogyakarta: Andi Offset.
- Oktavianty, N., Desyana, G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan konsep value for money. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(1), 1–7. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN METODE VALUE
FOR MONEY PADA PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR**

- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
- Rahman, K. G. (2022). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 198–209. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.216>
- Sujarweni, W. (2015). *Metode penelitian bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Verliana, D., Siboro, S. F., Ambarani, A., & Yudanti, A. (2024). Analisis value for money terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Depok tahun anggaran 2021–2023. *Jurnal Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.534>